

KONSTRUKSI IDENTITAS KEPAPUAAN DALAM DINAMIKA ARUS DEMOKRASI

Oleh: Habel Melkias Suwae¹, Heru Nugroho², Djoko Suryo³

Abstrak

Pembentukan identitas seseorang baik sebagai individu maupun kelompok pada perinsipnya melalui dua proses relasi, yaitu relasi dengan orang lain dan dirinya sendiri. Dalam relasinya dengan orang lain itulah kemudian membuka peluang bahwa pembentukan identitas sangat dipengaruhi faktor eksternal. Studi ini memfokuskan pada pembentukan identitas warga Papua dalam relasinya dengan narasi dominan, yaitu negara dan agama, di mana keduanya selama ini merupakan faktor eksternal yang cukup dominan dalam mengkonstruksi identitas Papua.

Temuan studi ini antara lain, identitas kepapuan dikonstruksikan oleh kekuatan negara melalui politik penyeragaman. Pada masa itu orang Papua adalah obyek yang dipandang oleh pemerintah pusat, sehingga terus mengalami marginalisasi dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial-kebudayaan. Melalui proyek kesatuan dan persatuan bangsa, orang Papua harus menjadi orang Indonesia yang bias pusat. Di sinilah kemudian terjadi bagaimana konstruksi Papua oleh pusat berada dalam posisi yang dipandang sebagai daerah pinggiran. Mula-mula cara pandang pusat memang secara teritori, tetapi kemudian juga secara politik dan kebudayaan. Oleh karena itu Papua mengalami marginalisasi baik secara politik maupun kebudayaan.

Sementara itu, agama, dalam hal ini agama Kristen, memandang sistem keyakinan masyarakat Papua yang lebih berkarakter animisme sebagai liyan (others). Dalam pandangan Kristen agama lokal orang Papua adalah masalah yang harus diselesaikan dengan sistem keyakinan Kristen, agama smitis yang monotesme. Sebagai narasi dominan, agama Kristen memposisikan diri sebagai superior atas inferioritas agama lokal orang Papua. Karena itu dalam rangka kristenisasi agama lokal Papua semua keyakinan orang Papua harus ditinggalkan dan harus memeluk Kristen. Politik penundukan ini berlangsung secara sistematis melalui berbagai jalur, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Dalam kondisi dan kesadaran sebagai orang pinggiran itulah kemudian orang Papua mengkonstruksi identitasnya. Pada umumnya orang tidak pernah mempertanyakan bahwa bagaimana proses terbentuknya kesadaran itu, yang sebenarnya kesadaran yang dibentuk, sebuah kesadaran dikonstruksikan oleh pihak eksternal dan ketika melakukan proses komunikasi intrapersonal maka terjadilah proses konsensus bahwa kami orang Papua memang seperti yang dikonstruksikan oleh pihak luar itu.

¹ Mahasiswa program doktor Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana UGM

² Guru Besar Sosiologi FISIPOL UGM

³ Guru Besar Sejarah UGM

Terdapat tiga respons atas konstruksi identitas Papua oleh kedua narasi dominan tersebut. Pertama, ada yang merespons dengan ketundukan, dalam arti proses pembentukan identitas internalnya sangat dipengaruhi oleh pengkonstruksi faktor eksternal, yaitu negara dan agama. Dalam proses ini, orang Papua mengkonstruksi identitasnya seperti yang dikonstruksi negara, dengan menjadi Indonesia yang bias pusat. Sementara orang Papua juga mengkonstruksi identitasnya seperti yang dikonstruksikan agama, dengan menjadi Kristen yang meninggalkan sistem keyakinan lokalnya, dan bahkan ada yang berbalik menjadi pelaku pemberantasan keyakinan lokal.

Respons kedua atas pengkonstruksian dua narasi besar tersebut adalah akomodatif. Akan tetapi sikap akomodatif orang Papua ini lebih tepat penerimaan dalam ketidakberdayaan. Karena kondisi obyektif masyarakat Papua memang lemah sumber daya manusia, dan bersamaan dengan itu perlu akselerasi dan eskalasi untuk maju atau modern, maka mau tidak mau Papua perlu penggerak ekonomi, penggerak pendidikan yang harus didatangkan dari luar. Akhirnya ia berada dalam suatu situasi serba terpaksa menerima kedatangan pihak dari luar. Sikap mereka terhadap luar ini terpaksa harus "toleran", yang secara substantif lebih merupakan ketidakberdayaan.

Respons ketiga atas pengkonstruksian identitas dari dua narasi dominan itu adalah dengan negosiasi. Dengan mengambil momen era reformasi, orang Papua mencoba mengkonstruksi identitasnya dengan taktik negosiasi. Dengan taktik negosiasi itu orang Papua mengkonstruksi identitas yang cair, sebuah identitas yang meng "atas"-i kekentalan golongan, etnis, dan agama. Caranya dengan taktik bernegosiasi dan dialog dengan narasi dominan.

Kata Kunci: Negara, Identitas, Papua, Multikultural

A. Latar Belakang

Papua bukan merupakan entitas tunggal, melainkan penuh varian baik dilihat dari latar belakang suku, agama, tingkat pendidikan, budaya, maupun tingkat sosial ekonomi. Kondisi semacam itu juga sudah tergambar sejak sebelum masuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kesadaran sebagai sebuah kesatuan etnis yang berada dalam satu wilayah pulau Papua terbentuk belum terlalu lama. Kesadaran itu baru muncul pada dekade empat puluhan yang dirintis dan dipelopori oleh kalangan elite terdidik yang merupakan lulusan Sekolah Pamong Praja milik Pemerintah Belanda. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan kepulauan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikan Negara Papua Barat.⁴ Dari sini konstruksi identitas sebagai kesatuan etnis yang ingin berdiri sebagai sebuah Negara tersendiri mulai terbentuk.

⁴ Decki Natalis Pigay, 2000, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: Sinar Harapan) hal. 285.

Akan tetapi konstruksi identitas kepapuan itu mulai surut ketika Pemerintah RI di bawah Presiden Soekarno menghendaki bahwa Papua harus bergabung dengan Indonesia. Papua pun kemudian diganti nama menjadi Irian Barat, dan bersamaan dengan itu konstruksi identitas kepapuan mengalami stagnasi, karena harus merujuk pada konstruksi identitas yang dibentuk dari pemerintah pusat Jakarta. Imajinasi sebagai bangsa yang berdiri sendiri berdasarkan kesatuan etnis Melanesia pun mengalami masa surut, dan konstruksi identitas masyarakat Papua dibentuk oleh faktor eksternal.

Situasi semacam itu terus berlangsung hingga pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, yang membentuk konstruksi identitas masyarakat Papua dengan konsep militeristik yang dijalankan secara sistematis oleh ABRI. Pada periode ini, masyarakat Papua praktis tidak diberi ruang dan peluang untuk mengkonstruksikan sendiri identitasnya berdasarkan fondasi sosio-kulturalnya.⁵ Bersamaan dengan itu, Papua menjadi wilayah yang terbuka bagi masuknya berbagai aktivitas baik ekonomi, politik, maupun sosial-budaya yang dibawa oleh arus modernisasi.

Persinggungan dengan dunia luar membuat masyarakat Papua berelasi dengan berbagai budaya dan kepentingan lain yang terus melakukan interaksi secara intens. Persoalan identitas pun kemudian muncul, dalam arti bagaimana orang Papua harus mengkonstruksikan identitasnya tetap merujuk pada nilai-nilai dan budaya lama atau harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dan konstruksi budaya baru yang dibawa oleh arus modernisasi. Hanya saja satu hal yang dapat dibaca di sini adalah, bahwa peran Negara dalam era Orde Baru terasa sangat dominan, dalam mengkonstruksikan identitas masyarakat Papua yang sudah semakin terbuka. Sejak diberlakukannya otonomi khusus, terdapat ruang yang leluasa bagi masyarakat Papua untuk mengkonstruksi identitasnya, karena wilayah ini menjadi semakin terbuka bagi semua kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagaimana diketahui, melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Papua telah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundangan. Dengan Otsus para elite politik di Papua kebanyakan memilih bersikap terbuka terhadap masuknya para investor, baik dari dalam dan luar negeri untuk tujuan mengembangkan Papua lebih maju. UU Otsus itu pun memang dengan eksplisit menyebutkan bahwa Papua dikategorikan sebagai daerah tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Tengah dan apalagi wilayah Indonesia Barat.

Sebagai masyarakat terbuka, Papua kemudian berkembang menjadi masyarakat yang plural, dan masing-masing memiliki identitasnya sendiri. Mereka itu saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan masing-masing menunjukkan identitasnya. Dinamika interaksi sosial itu kemudian membaw implikasi pada dua kemungkinan, yaitu menuju proses integrasi atau konflik.

⁵ Dikutip dari S, Bayu Wahyono dkk., 2004, Gerakan Separatis di Bumi Cenderawasih, dalam *Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Inpedham.

Dalam pergulatannya dengan berbagai kepentingan yang berkembang dalam sejarah Papua itulah, kemudian muncul persoalan bagaimana orang Papua harus mengkonstruksikan identitasnya bersama dengan dinamika perkembangan masyarakat. Persoalan identitas pun kemudian muncul, dalam arti bagaimana orang Papua harus mengkonstruksikan identitasnya tetap merujuk pada nilai-nilai dan budaya lama atau harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dan konstruksi budaya baru yang dibawa oleh arus modernisasi.

Beberapa masalah diajukan dalam studi ini, antara lain: bagaimana orang Papua mengkonstruksikan identitasnya dirinya sesuai yang mereka kehendaki di tengah perubahan sosial masyarakat menuju demokrasi?; dalam dinamika masyarakat Papua, narasi-narasi apa saja yang dominan dalam membentuk identitas orang Papua?; melalui bentuk-bentuk aktivitas seperti apa para aktivis membongkar narasi dominan dalam pembentukan identitas dirinya?; dan narasi alternative apa sajakah yang digunakan sebagai alat perjuangan mengkonstruksi identitas Kepapuaan saat ini?

B. Kajian Teori

Dalam usaha menjelaskan bagaimana pergulatan masyarakat Papua mengkonstruksi identitasnya, studi ini akan menggunakan beberapa teori tentang etnisitas dan identitas, serta beberapa pandangan teoretik dari perspektif multikulturalisme.

1. Teori Etnisitas

Kata etnis menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok atau individu-individu yang menyatukan diri dalam kolektivitas (Rex, 1994: 8). Karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis adalah tumbuhnya “perasaan dalam satu komunitas” (*sense of community*) di antara para anggotanya sehingga terselenggaralah rasa kekerabatan. Dalam identifikasi kelompok etnis, mempunyai dua pandangan pengertian yaitu (1) sebagai sebuah unit obyektif yang dapat diartikan oleh perbedaan sifat budaya seseorang; atau (2) hanya sekadar produk pemikiran seseorang yang kemudian menyatakannya sebagai suatu kelompok etnis tertentu (Nangen, 1994: 13).

Terdapat beragam pandangan dan perspektif yang berupaya memahami etnisitas sebagai gejala ilmu sosial. Pada awalnya etnisitas adalah gejala biologis, yang salah satu asumsinya mengatakan bahwa etnis bagaimanapun juga merupakan kecenderungan natural. Suatu bangsa secara reflektif mengidentifikasi sebagai sebuah bangsa atau sebagai etnis, sebagai sesuatu yang secara natural memang sudah demikian, seperti lewat begitu saja mengacu pada rumusan pendahulunya (Lipschutz, 1998: 54-55). Dalam hal itu, etnisitas banyak ditentukan oleh karakteristik tubuh.

etnisitas muncul karena menyangkut gagasan tentang perbedaan, dikotomi kami dan mereka dan perbedaan atas klaim terhadap dasar, asal-usul, dan karakteristik budaya. Etnisitas adalah hasil dari proses hubungan, bukan karena proses isolasi sebagaimana pandangan yang berdasarkan pada teritori. Jika tidak ada perbedaan antara orang dalam dan orang luar, tidak ada yang namanya etnisitas (Dwyer, 1996: 3).

Begitulah, etnisitas merupakan konsep kebudayaan yang berpusat pada norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, simbol-simbol dan praktek-praktek kebudayaan. Formasi kelompok-kelompok etnis menyandarkan diri pada kebudayaan yang telah berkembang di bawah proses sejarah yang spesifik, konteks sosial politik dan yang membentuk rasa saling memiliki, paling tidak pada bagian tertentu, bentuk kelompok etnis tersebut didasarkan pada keturunan secara mitologis bersama. Akan tetapi menurut pandangan anti-esensialisme, sangatlah jelas bahwa kelompok-kelompok etnis tidak berdasarkan pada factor-faktor primordial atau karakter kebudayaan universal yang membuat terbentuknya kelompok etnis tertentu atau spesifik, tetapi terbentuk melalui praktek-praktek yang tidak berkaitan satu sama lain. Etnisitas dibentuk oleh identitas kelompok dan diidentifikasi oleh tanda-tanda dan simbol-simbol dan kesepakatan etnisitas.

Oleh karena itu etnisitas adalah sebuah konsep rasional mengenai kategori-kategori identifikasi-diri (*self-identification*) dan askripsi sosial. Tentang apa yang kita pikirkan sebagai identitas kita adalah tergantung pada apa yang kita berpikir bahwa kita adalah *bukan* bagian dari mereka. Orang Serbia adalah bukan Kroasia, Bosnia atau Albania, meskipun secara rasial mereka sama. Sebagai konsekuensinya, etnisitas mesti dipahami sebagai proses konstruksi formasi terbatas dan dilestarikan oleh kondisi-kondisi sosio-historis yang spesifik (Barker, 2000: 195). Tentu saja, menganjurkan bahwa etnisitas bukan tentang perbedaan kebudayaan yang *pre-given*, tetapi merupakan formasi terbatas yang terus dilestarikan bukan berarti bahwa perbedaan demikian tak dapat dikonstruksikan secara sosial seputar penanda yang berkonotasi universalitas, teritori dan pemurnian, sebagai contoh kiasan-kiasan tentang darah, kekerabatan, dan tanah air.

Konsepsi kulturalis tentang etnisitas telah berani berusaha lari dari implikasi rasis yang inheren dalam melupakan secara historis konsep ras. Sebagaimana Hall menulis:

Jika seorang kulit hitam dan pengalamannya tidak ditentukan oleh Alam atau oleh sesuatu yang esensial lainnya, kemudian itu harus menjadi kasus bahwa mereka dikonstruksikan secara historis, kultural, dan secara politik –konsep ini merujuk pada etnisitas. Istilah etnisitas mengakui adanya tempat sejarah, bahasa dan kebudayaan dalam konstruksi subyektivitas dan identitas, dan juga fakta bahwa semua wacana ditempatkan, diposisikan, disituasikan, dan semua pengetahuan adalah kontekstual (Hall, 1996: 446).

Akan tetapi konsep etnisitas bukan berarti tidak ada masalah dalam penerapannya. Misalnya, kulit putih Anglo Saxsons sering menggunakan konsep etnisitas untuk merujuk pada *bangsa lain (other people)*, biasanya dengan pembedaan warna kulit, maka bangsa Asia, Afrika, Spanyol, dan Afrika-Amerika merupakan sekelompok etnis tersendiri, sedangkan orang

Inggris atau kulit putih Anglo-Saxon atau orang Australia adalah bukan bagian dari kelompok tersebut.

2. Teori Identitas

Isu identitas dan subyektivitas telah menjadi tema utama dalam studi kebudayaan di Barat selama dekada 1990-an, terutama oleh kalangan “rezim tentang diri” (*regime of the self*). Secara konseptual subyektivitas dan identitas mempunyai hubungan yang erat dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang subyektivitas, pertanyaannya akan berada di seputar apakah person itu? Sementara mengeksplorasi tentang identitas adalah menanyakan: bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita? (Barker, 2000: 165).

Menurut Antony Giddens, identitas diri dipahami dengan keahlian menarasikan tentang diri, dengan demikian menceritakan perasaan yang konsisten tentang kontinuitas biografi. Cerita identitas berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis: Apa yang dikerjakan? Bagaimana melakukannya? Siapa yang menjadi? Seseorang berusaha mengkonstruksi cerita identitas yang saling bertalian di mana diri membentuk lintasan perkembangan dari pengalaman masa lalu menuju masa depan (Giddens, 1991:75). Oleh karena itu, identitas diri bukan sifat yang distingtif, atau merupakan kumpulan sifat-sifat yang dimiliki oleh individu. Identitas diri adalah diri sebagai pengertian secara refleksi oleh seorang dalam biografi dia (Giddens, 1991: 53).

Sementara itu, Stuart Hall dalam artikelnya yang berjudul *The Question of Cultural Identity*, mengidentifikasi tiga perbedaan cara yang mengkonseptualisasikan identitas, yaitu (a) subyek pencerahan; (b) subyek sosiologi, dan (c) subyek posmodernisme.

Dalam perspektif era pencerahan berkembang gagasan bahwa pribadi dipandang sebagai agen kesatuan yang unik dan bersekutu terhadap Pencerahan (*Enlightenment*). Hall menuturkan:

The enlightenment subject was based on conception of the human person as a fully centred, unified individual, endowed with the capacities of reason, consciousness and action, whose ‘centre’ consisted of an inner core The essential centre of the self was a person’s identity (Hall, 1992: 275).

Hall juga menganjurkan bahwa untuk memahami konsep identitas kebudayaan juga erat kaitannya dengan asumsi-asumsi yang berkembang dalam aliran pemikiran *esensialisme* dan *anti-esensialisme* kebudayaan. Dalam pandangan kaum esensialis, bahwa pribadi-pribadi mempunyai hakekat tentang diri yang disebut identitas. Kaum esensialisme berasumsi bahwa diskripsi diri kita mencerminkan hakekat yang didasari identitas. Dengan demikian akan bisa ditetapkan apa itu hakekat femininitas, maskulinitas, orang Asia, remaja dan semua kategori sosial yang lain. Sebaliknya, terdapat pula pandangan bahwa identitas sepenuhnya merupakan kebudayaan, yang dibentuk berdasarkan ruang dan waktu. Ini merupakan pandangan kaum anti-

esensialisme yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk identitas senantiasa berubah dan berkaitan dengan kondisi sosial dan kebudayaan. Identitas adalah konstruksi-konstruksi yang tidak saling berkaitan, makna-maknanya senantiasa berubah mengikuti ruang dan waktu, serta penggunaannya.

Asumsi kaum esensialisme meyakini bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, baku dan berdiri sendiri. Dalam pandangan mereka, tingkah laku sekelompok orang akan tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya perlu diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pondasi bagi tingkah laku budaya. Salah satu ungkapan yang khas kaum esensialisme budaya ini adalah: “jangan salahkan kebudayaan, tetapi salahkan orangnya.” Kalau ada yang menyimpang dalam kebudayaan maka yang harus diubah adalah tingkah laku budaya dan bukannya nilai dan norma-norma kebudayaannya. Dalam pandangan mereka, sistem dan norma itu sudah baku, tidak bisa diubah, sehingga jika ada fenomena penyimpangan, tingkah laku manusia dianggap sebagai menyimpang dari sistem nilai dan norma yang berlaku.

2. Teori Multikultural

Secara konseptual, multikulturalisme berbeda dengan pluralisme. Pluralisme hanya sebuah pengakuan terhadap keanekaragaman, tentang kemajemukan atau kebhinekaan, bahwa di sana terdapat berbagai macam ras, suku, agama atau kelompok-kelompok budaya. Sedangkan multikulturalisme lebih sekadar pengakuan tetapi membuka ruang untuk akses dan bereksistensi bagi semua elemen keanekaragaman tersebut dengan bersandar pada jati diri masing-masing, dan kemudian saling berkomunikasi tanpa harus saling mematahkan satu sama lain.

Multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap-tiap kelompok etnis, ras, agama, dan entitas kebudayaan. Dalam pandangan ini baik sebagai individu maupun kelompok dari berbagai kesatuan sosial bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas kulturalnya, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat.

Perkembangan terkini yang terkait erat dengan postmodernisme-khususnya penekanannya pada wilayah pinggir dan kecenderungannya untuk memperluas arena permainan intelektual-adalah munculnya teori sosial multikultural, terutama yang dirintis oleh Rogers (1996) dan Lemert (2001) yang kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh lain, terutama yang memiliki perhatian pada feminisme (Ritzer dan Goodman, 2004: 245).

Teori multikultural memiliki beragam bentuk di luar teori homoseksualitas. Contohnya antara lain teori Afrosentris (Asante, 1996), studi suku Appalachia (Banks, Bellings, dan Tice, 1996), teori warga Amerika Asli (Buffalohead, 1996), dan bahkan teori maskulinitas (Connell, 1996; Kimmel, 1996).

Berbagai rumusan tentang pengertian multikulturalisme berusaha didiskusikan, yang secara sederhana dapat dipahami bahwa multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap-tiap kelompok etnis, ras, agama, dan entitas kebudayaan. Dalam pandangan ini baik sebagai individu maupun kelompok dari berbagai kesatuan sosial bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas kulturalnya, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat.

Di antara yang menjadi ciri teori multikultural adalah sebagai berikut:

- a. Penolakan atas teori universalistik yang cenderung mendukung mereka yang berkuasa; teori multikultural cenderung memberdayakan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.
- b. Teori multikultural berusaha agar inklusif, menawarkan teori atas nama beragama kelompok yang tidak berdaya.
- c. Para teoritis multikultural tidaklah bebas nilai; sering kali mereka membangun teori atas nama mereka yang tidak berdaya dan bekerja di dunia sosial untuk mengubah struktu sosial, kebudayaan, dan masa depan individu.
- d. Para teoritis multikultural tidak hanya berusaha menggoyang dunia sosial namun juga dunia intelektual; mereka berusaha membuatnya jauh lebih terbuka dan beragam.
- e. Tidak ada upaya untuk membuat garis pemisah yang elasti antara teori dengan tipe narasi lain.
- f. Biasanya terdapat ujung kritis bagi teori multikultural; ia kritis terhadap diri sendiri dan bersikap kritis terhadap teori lain, dan lebih penting lagi, kritis terhadap dunia sosial.
- g. Para teoritis multikultural mengakui bahwa karya mereka dibatasi oleh konteks historis, sosial, dan budaya tempat mereka kebetulan hidup (Rogers, 1996b: 11-16).

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (Unesco) sudah cukup lama mengintrodusir pendekatan tersebut dan menganjurkannya kepada negara-negara yang warganya heterogen. Anjuran Unesco ini disemangati oleh ucapan antropolog, Claude Levi-Strauss, bahwa keberagaman budaya ada di belakang, di depan, dan di sekeliling kita. Satu-satunya kebutuhan kita adalah bagaimana membuat semua (keberagaman) itu memberikan sumbangannya yang paling berharga bagi semua orang.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan observasi langsung ke lokasi yang menjadi obyek utama penelitian, yaitu masyarakat Papua. Dalam usaha mengembangkan teori berdasarkan data lapangan, metode observasi partisipasi juga dilakukan. Studi lapangan ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyektif dinamika masyarakat Papua. Di samping itu penelitian ini juga

merupakan studi dokumentasi membimbing penelitian ini pada pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen dari segenap teks, yang berkaitan dengan pembentukan konstruksi identitas masyarakat Papua.

Dengan kata lain, studi ini merupakan perpaduan antara kerja lapangan (*field work*) dan kerja pustaka dengan penggalian data sekunder melalui pelacakan dari dokumen otentik. Kerja lapangan dimaksudkan untuk dapat mengeksplorasi dan memperoleh data primer (*first hand informations*) dan kerja pustaka dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder (*second hand informations*). Penggunaan perpaduan antara data primer dan sekunder diharapkan akan dapat menghasilkan akurasi analisis dan kedalaman interpretasi atas masalah tersebut.

Lokasi studi ini di wilayah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Teknik pengumpulan data dalam studi ini menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara, dokumentasi, dan fokus group discussion (FGD). Dalam penelitian kualitatif ini analisis akan dilakukan mulai dari proses pengumpulan data. Informasi data yang diperoleh dari awal kegiatan penelitian ini, yaitu mulai tahap observasi perndahuluan sampai wawancara, kemudian langsung diorganisir yaitu disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenis, kategori data, dan satuan uraian sesuai dengan keperluan dan prioritas penafsiran atau pembahasan hasil penelitian.

D. Temuan Penelitian

Pembentukan identitas seseorang baik sebagai individu maupun kelompok pada perinsipnya melalui dua proses relasi, yaitu relasi dengan orang lain dan dirinya sendiri. Dalam relasinya dengan orang lain itulah kemudian membuka peluang bahwa pembentukan identitas sangat dipengaruhi faktor eksternal. Berangkat dari asumsi itu, menyangkut pertanyaan siapa yang mengkonstruksi identitas orang Papua, maka terdapat dua narasi besar yang cukup dominan dalam membentuk identitas orang Papua. Narasi besar itu pertama yaitu negara dan kedua adalah agama, keduanya selama ini merupakan faktor eksternal yang cukup dominan dalam mengkonstruksi identitas Papua.

Negara dengan menggelindingkan isu modernisasi dan politik terus memberi andil besar dalam proses pembentukan identitas Papua. Terutama sejak era Orede Baru, negara meluncurkan program modernisasi hingga ke daerah pedesaan, tidak terkecuali Papua. Pemerintah pusat mempunyai keyakinan besar, hanya dengan modernisasi maka masyarakat Papua akan maju dan sejahtera. Dengan argumen yang linieristik dan dilandasi filsafat positivistik, pemerinah pusat menggulirkan modernisasi melalui program pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sebagai implikasi menganut cara berpikir linieristik dan mengikuti logika pemikiran positivistik, modernisasi di Indonesia dijalankan secara masif melalui program pembangunan.

Pandangan linieristik berasumsi bahwa sejarah perkembangan masyarakat bersifat linier melalui tahapan demi tahapan ke arah masyarakat yang lebih maju, yaitu suatu masyarakat modern dan industrial. Sebagai ilustrasi, masyarakat berkembang dari tahap masyarakat primitif, masyarakat

pertanian, masyarakat industri, dan berakhir pada masyarakat informasi. Maka dicanangkannya proses pembangunan jangka panjang yang populer dengan Repelita satu hingga lima di mana masyarakat Indonesia pada Pelita kelima itu sudah tinggal landas. Implikasi dari berkembangnya cara berpikir yang dipengaruhi oleh teori modernisasi itu, maka posisi masyarakat Papua oleh pemerintah dianggap masih berada pada tahap masyarakat pertanian dan bahkan sebagian masuk dalam kategori masyarakat primitif. Dari sinilah kemudian pemerintah pusat yang sedang terobsesi pada modernisasi mulai mengkonstruksi identitas orang Papua.

Di mata pemerintah pusat orang Papua adalah masih jauh dari karakteristik masyarakat modern, sehingga sering dinilai sebagai primitif, bodoh, bau, dan sukar diajak maju. Ini menimbulkan karakter relasi kuasa yang bersifat vertikal, dengan pemerintah pusat sebagai pihak yang dominan dan orang Papua yang diposisikan sebagai subordinan. Karena itu identitas orang Papua di mata pemerintah pusat harus dibentuk agar dapat menjadi modern. Perlakuan yang tidak proporsional itu bersumber dari cara berpikir orang pusat yang senantiasa memosisikan orang Papua sebagai obyek yang terus dipandang. Tidak pernah orang Papua secara leluasa diberi peluang untuk mengkonstruksi sendiri secara bebas apa yang menjadi identitasnya. Secara kebudayaan, pemerintah pusat memandang sebelah mata terhadap eksistensi budaya Papua. Atau paling tidak pemerintah pusat bersikap mendua terhadap Papua. Ambiguitas pusat ini sangat terasa ketika memandang representasi orang Papua. Di satu sisi, dalam hal yang berkaitan dengan sepakbola atau budaya Asmat misalnya, pemerintah pusat sangat membanggakan dan menawarkan ke berbagai penjuru dunia. Akan tetapi di satu sisi lain, orang Papua oleh pemerintah pusat dianggap masih primitif, bodoh, tukang mabuk, suka berkelai, mengedepankan kekerasan, dan eksotik.

Pembatasan atas pengkonstruksian identitas bahwa orang Papua hanya menonjol dalam hal sepakbola, akhirnya menutup peluang orang Papua berkarir di bidang lain. Dalam konteks keindonesiaan, jarang sekali orang Papua diberi peran menjadi seorang yang bertanggung jawab di bidang ekonomi atau kebudayaan, apalagi di bidang kemiliteran. Memang selama ini sudah banyak putra Papua menjadi menteri, tetapi kesannya tetap hanya diberi jatah dalam konteks menjaga negara kesatuan. Atau lebih tegas lagi, hanya diberi jatah satu menteri untuk meredam akumulasi kekecewaan yang berpotensi meningkatkan gerakan separatis.

Latar belakang kebijakan tersebut sudah tentu lebih bersifat politis ketimbang profesionalisme. Bagaimanapun Papua secara politik memiliki kekhususan di mata pemerintah pusat, terlebih lagi jika dilihat dari kepentingan militer. Hingga sekarang di mata pemerintah pusat Papua mempunyai problem separatisme. Dalam konstruksi pusat, Papua masih berpotensi memisahkan diri dengan Indonesia. Munculnya aksi-aksi yang tergabung dalam apa yang oleh pemerintah pusat disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) digunakan sebagai dasar bahwa Papua memang perlu diperlakukan khusus. Papua harus diawasi, diwaspai, dan dicurigai agar tidak memisahkan diri dengan Indonesia. Selama Orde Baru dan Papua tetap diberlakukan sebagai Daerah Operasi

Militer (DOM). Hingga sekarang pun, meski sudah agak longgar, tetapi secara substantif DOM tetapi diberlakukan.

Dasar utama yang dipakai oleh pemerintah pusat untuk mengkonstruksi orang Papua adalah tetap kecurigaan. Di mata orang Papua yang kritis selama ini pemerintah tidak mempercayai orang Papua. Hal ini tampak dalam wujud kecurigaan pemerintah yang berlebihan terhadap orang Papua. Sekalipun sudah 48 tahun bergabung dalam Republik Indonesia, pemerintah terkesan memberlakukan orang Papua bukan sebagai warga negara yang patut dilindungi keberadaannya, tetapi separatis yang mesti diwaspadai demi tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah membiayai TNI untuk melakukan serangkaian operasi militer guna membasmi separatis yang notabene adalah orang Papua.

Selanjutnya Tebay menjelaskan bahwa selain operasi militer, pemerintah juga menerapkan stigma separatis. Stigma ini menghambat orang Papua mengembangkan karier dalam politik dan pemerintahan. Para pejabat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majeles Rakyat Papua, serta tokoh-tokoh yang secara kritis menyuarakan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang Papua selalu dicurigai sebagai separatis. Kecurigaan semacam itu masih berlaku dan dirasakan orang Papua hingga kini. Akibatnya, gagasan sebagus apa pun tentang pembangunan yang dilakukan orang Papua banyak kali ditolak pemerintah.

Dengan dasar kecurigaan itu, maka pemerintah pusat merasa perlu untuk terus mengawasi orang Papua agar tidak memberontak. Selama ini perlakuan terhadap orang Papua sering kurang manusiawi. Sudah sering para anggota militer menggeledah, menginterogasi, dan bahkan menyiksa orang Papua, terutama yang dicurigai sebagai pengikut OPM. Perlakuan yang kurang adil dan tidak fair itu sangat mengabaikan HAM dan membentuk kesadaran bahwa orang Papua seakan-akan hidup di luar tanah kelahirannya sendiri. Perlakuan tidak adil itu menjadikan orang Papua merasa asing dengan tanah tumpah darahnya sendiri, dan hidup dalam ketakutan.

Warga masyarakat Papua pun telah lama menjadi obyek pengawasan oleh pemerintah pusat. Situasinya mirip seperti digambarkan oleh Foucault dengan istilah panopticon, yaitu semacam desain penjara yang terdiri dari lapangan terbuka dengan menara di tengahnya yang bisa digunakan untuk melihat ke seluruh bangunan dan sel, dengan jendela yang mengarah ke menara itu. Penghuni sel terlihat oleh mata sipir di menara itu namun dia tidak terlihat oleh para penghuni. Sel menjadi semacam 'teater kecil', di mana masing-masing aktor sendiri, terindividualkan secara sempurna dan terus-menerus tak tampak (Foucault, 1977:200).

Begitulah, masyarakat Papua di mata pemerintah pusat ibarat panopticon, seperti sel yang dihuni oleh para pesakitan yang terus diawasi oleh pengawas yang tidak tampak. Karena berlangsung terus menerus dan terindividualkan, maka warga Papua merasa terus ada yang mengawasi. Akibatnya, perilakunya adalah perilaku orang yang merasa terus-menerus mendapat pengawasan. Tidak pernah bebas, penuh ketakutan, dan sangat menderita. Situasi psikologis seperti itu tentu berpengaruh signifikan dalam

proses pembentukan identitasnya, yaitu identitas masyarakat yang tertekan, terawasi, dan tertindas. Masyarakat Papua menjadi masyarakat yang panoptik, dan karena itu identitas orang Papua juga identitas yang panoptik.

Stigma semacam itu telah berlangsung lama dan membuat kesadaran orang Papua sendiri terbentuk atas dasar ketakutan. Orang Papua tidak berani dan kurang percaya diri jika menyampaikan gagasan yang sebenarnya tidak kalah dengan gagasan dari para elite politik dan kaum intelektual di Jakarta.

Begitulah, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, narasi identitas kepapuan dikonstruksikan oleh kekuatan negara melalui politik penyeragaman. Pada masa itu orang Papua adalah obyek yang dipandang oleh pemerintah pusat, sehingga terus mengalami marginalisasi dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial-kebudayaan. Melalui proyek kesatuan dan persatuan bangsa, orang Papua harus menjadi orang Indonesia yang bias pusat.

Diungkapkan dengan kalimat yang berbeda, dalam konteks masyarakat Papua, ketika diletakkan dalam konteks wilayah Indonesia, terutama di era Orde Baru, posisi orang Papua adalah minoritas meskipun di wilayah Papua tampak mayoritas. Dilihat dari geopolitiknya, Papua terletak di pinggiran yang jauh dari pusat. Di sinilah kemudian terjadi bagaimana konstruksi Papua oleh pusat berada dalam posisi yang dipandang sebagai daerah pinggiran. Mula-mula cara pandang pusat memang secara teritori, tetapi kemudian juga secara politik dan kebudayaan. Oleh karena itu Papua mengalami marginalisasi baik secara politik maupun kebudayaan.

Karakter relasi kuasa seperti itu kemudian membentuk identitas orang Papua, yaitu ketika kesadaran mereka berada dalam posisi orang marginal, orang pinggiran. Dalam kondisi dan kesadaran sebagai orang pinggiran itulah kemudian orang Papua mengkonstruksi identitasnya. Pada umumnya orang tidak pernah mempertanyakan bahwa bagaimana proses terbentuknya kesadaran itu, yang sebenarnya kesadaran yang dibentuk, sebuah kesadaran dikonstruksikan oleh pihak eksternal dan ketika melakukan proses komunikasi intrapersonal maka terjadilah proses konsensus bahwa kami orang Papua memang seperti yang dikonstruksikan oleh pihak luar itu.

Konstruksi identitas oleh negara seperti itu menggunakan dasar teori etnisitas dan identitas yang mengikuti pandangan esensialistik sebagaimana dikemukakan oleh Stuart Hall. Di sini etnisitas lebih dipahami sebagai gejala biologis, yang salah satu asumsinya mengatakan bahwa etnis bagaimanapun juga merupakan kecenderungan natural. Suatu bangsa secara reflektif mengidentifikasi sebagai sebuah bangsa atau sebagai etnis, sebagai sesuatu yang secara natural memang sudah demikian, seperti lewat begitu saja mengacu pada rumusan pendahulunya. Dalam hal itu, etnisitas banyak ditentukan oleh karakteristik tubuh. Menurut Hall, kaum esensialis berpandangan bahwa setiap individu mempunyai hakekat tentang diri yang disebut identitas. Kaum esensialisme berasumsi bahwa diskripsi diri kita mencerminkan hakekat yang didasari identitas. Dengan demikian akan bisa ditetapkan apa itu hakekat orang Papua yang dianggap sebagai kategori sosial yang tetap. Akibatnya muncul stereo type terhadap orang Papua yang

dipandang memiliki perbedaan menurut ciri tubuh, status sosial lebih rendah, dan status kebudayaan yang primitif. Proses konstruksi identitas seperti ini pun juga berlangsung pada kalangan orang Papua sendiri, sehingga mereka mengidentifikasi dirinya dengan berkulit hitam, berambut kriting, merasa tertinggal, dan bahkan primitif.

Sementara itu faktor eksternal lain adalah agama, yang merupakan narasi dominan yang cukup signifikan dalam mengkonstruksi identitas orang Papua. Agama, dalam hal ini agama Kristen, memandang sistem keyakinan masyarakat Papua yang lebih berkarakter animisme sebagai liyan (*others*). Dalam pandangan Kristen agama lokal orang Papua adalah masalah yang harus diselesaikan dengan sistem keyakinan Kristen, agama smitis yang monotesme. Sebagai narasi dominan, agama Kristen memposisikan diri sebagai superior atas inferioritas agama lokal orang Papua. Karena itu dalam rangka kristenisasi agama lokal Papua semua keyakinan orang Papua harus ditinggalkan dan harus memeluk Kristen. Politik penundukan ini berlangsung secara sistematis melalui berbagai jalur, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Melalui politik pembinaan, Kristen terus memposisikan agama lokal sebagai sesuatu yang harus diluruskan, dibina, dan dimurnikan seperti agama smitis. Memang khususnya Kristen Katolik ada pendekatan budaya dalam menjalankan kristenisasi, sehingga tampak lebih akomodatif dengan budaya lokal. Akan tetapi secara substantif tetap mengoperasikan politik penundukan atau panaklukan budaya lokal, dengan tetap memposisikan agama lokal sebagai *others*.

Sementara para penyebar agama Kristen Protestan yang kurang akomodatif terhadap eksistensi budaya lokal, memposisikan sistem keyakinan orang Papua sebagai yang memang harus dibasmi. Analoginya Kristen memandang agama lokal seperti hama yang harus dibasmi dengan obat mujarap, yaitu agama smitis. Karena itu Kristen terus melancarkan pemurnian agama, dengan mengharuskan siapa pun yang sudah menyatakan memeluk agama Kristen harus segera meninggalkan segala bentuk keyakinan lokal yang dianggap penuh mistik. Ajaran mistik agama lokal Papua harus segera ditinggalkan, karena dalam pandangan Kristen semua itu adalah agama setan. Kristen terus membina, meluruskan, memanggil, meneriaki, dan adakalanya menghardik sistem keyakinan lokal untuk segera ditinggalkan. Kristen terus melancarkan politik pembinaan ini dengan menertibkan dan mendisiplinkan agama lokal agar menjadi Kristen yang dimodernkan.

E. Penutup

Begitulah, kedua narasi dominan, yaitu negara dan agama yang merupakan faktor eksternal pembentuk identitas tetap memposisikan Papua sebagai *others*. Karena itu Papua harus tetap dikontrol dan diawasi agar mengalami ketundukan total terhadap negara dan agama sebagai pembentuk identitas. Proses pergulatan dalam relasi kuasa seperti itu akhirnya juga membentuk identitas internal Papua.

Jadi ketika berinteraksi dengan negara, orang Papua terus dalam pengawasan melalui sistem panopticon, yang tentu saja membentuk kesadaran

panoptik bagi warga Papua. Kesadaran panoptik seperti itulah yang tercermin pula dalam proses internal pembentukan identitas juga seperti identitas yang dikonstruksi oleh faktor eksternalnya. Mereka memandang dirinya lebih banyak seperti yang dikonstruksikan oleh faktor eksternalnya.

Sementara itu ketika berinteraksi dengan agama, orang Papua terus berada dalam politik pembinaan agama smitis, sehingga proses konstruksi identitasnya juga berada dalam posisi yang dibentuk oleh faktor eksternalnya. Ketika membentuk identitasnya melalui faktor internal, maka orang Papua memandang dirinya juga seperti yang dikonstruksi agama smitis dengan kesadaran pihak yang dibina. Orang Papua dalam proses pembentukan identitasnya secara internal, tidak mampu otonom karena kesadarannya adalah kesadaran panoptik dan kesadaran orang yang dibina.

Bagaimana respons orang Papua atas pengkonstruksian oleh dua narasi besar tersebut. Pertama, ada yang merespons dengan ketundukan, dalam arti proses pembentukan identitas internalnya sangat dipengaruhi oleh pengkonstruksi faktor eksternal, yaitu negara dan agama. Dalam proses ini, orang Papua mengkonstruksi identitasnya seperti yang dikonstruksi negara, dengan menjadi Indonesia yang bias pusat. Sementara orang Papua juga mengkonstruksi identitasnya seperti yang dikonstruksikan agama, dengan menjadi Kristen yang meninggalkan sistem keyakinan lokalnya, dan bahkan ada yang berbalik menjadi pelaku pemberantasan keyakinan lokal.

Proses ketundukan orang Papua ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan strategi narasi dominan yang menerapkan hegemonisasi terhadap lokal. Sebagaimana dikatakan oleh Gramsci tentang ideologi. Secara khusus Gramsci menawarkan penjelasan yang lebih fleksibel, canggih dan praktis tentang karakter dan bekerjanya ideologi. Salah satu konsep utama yang ditawarkan oleh Gramsci adalah apa yang dikenal dengan hegemoni. Dalam situasi negara sangat dominan di bawah sistem pemerintahan otoriter, konsep hegemoni ini sangat sering digunakan narasi dominan untuk menghegemoni pihak subordinan. Bagi Gramsci, hegemoni berarti situasi di mana suatu "blok historis" faksi kelas berkuasa menjalankan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan dengan persetujuan. Untuk itu ia mengatakan: *Praktik normal hegemoni di arena klasik rezim parlementer dicirikan dengan komninsi kekuatan dan persetujuan, yang secara timbal balik saling mengisi tanpa adanya kekuatan yang secara berlebihan memaksakan persetujuan. Namun upaya yang sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut seakan-akan hadir berdasarkan persetujuan mayoritas yang diekspresikan oleh apa yang disebut dengan organ opini publik –koran dan asosiasi (Gramsci, 1971: 80).*

Respons kedua atas pengkonstruksian dua narasi besar tersebut adalah akomodatif. Akan tetapi sikap akomodatif orang Papua ini lebih tepat penerimaan dalam ketidakberdayaan. Karena kondisi obyektif masyarakat Papua memang lemah sumber daya manusia, dan bersamaan dengan itu perlu akselerasi dan eskalasi untuk maju atau modern, maka mau tidak mau Papua perlu penggerak ekonomi, penggerak pendidikan yang harus didatangkan dari luar. Akhirnya ia berada dalam suatu situasi serba terpaksa menerima

kedatangan pihak dari luar. Sikap mereka terhadap luar ini terpaksa harus “toleran”, yang secara substantive lebih merupakan ketidakberdayaan.

Sebagai konsekuensi daerah terbuka, di Papua dalam dua dekade terakhir jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan secara cukup signifikan. Setiap kali statistik melaporkan bahwa penduduk Papua naik 5 persen per tahunnya, terutama di daerah perkotaan. Akan tetapi jika dicermati kenaikan 5 persen itu bukan dari penduduk asli, melainkan para pendatang dari luar Papua yang ingin mengadu nasib di Papua. Kecenderungan semacam itu menjadi semakin memperkecil persentase orang Papua, terutama di perkotaan. Sekarang sering terdengar dua per tiga penduduk kota di Papua adalah pendatang, dan persentase jumlah penduduk Papua asli semakin kecil. Fenomena ini terjadi di kota-kota seperti Merauke, Jayapura, Nabire, Sorong, dan Timika. Jadi dilihat dari persentase penduduk, terdapat kecenderungan adanya proses marginalisasi penduduk Papua.

Fakta marginalisasi tersebut juga diikuti oleh aspek yang lain, seperti di bidang ekonomi. Di sektor perdagangan misalnya, terjadi semacam seleksi alam untuk memenangkan sebuah kompetisi sosial ekonomi dalam suatu masyarakat yang sudah mulai tersentuh modernisasi seperti di Papua kontemporer. Secara kebudayaan, orang Papua tidak memiliki tradisi berdagang. “Orang Papua bukan berkultur dagang, dan bahkan di beberapa daerah tidak mengenal jual dan beli”, kata Neles Tebay. Dalam kondisi seperti itu maka tidak mengherankan jika mereka dalam sektor ekonomi akan semakin tersisih. Gejala sudah tampak di daerah perkotaan, tidak ada yang menjadi pelaku dalam perdagangan.

Respons ketiga atas pengkonstruksian identitas dari dua narasi dominan itu adalah dengan negosiasi. Dengan mengambil momen era reformasi, orang Papua mencoba mengkonstruksi identitasnya dengan taktik negosiasi. Dengan taktik negosiasi itu orang Papua mengkonstruksi identitas yang cair, sebuah identitas yang meng “atas”-i kekentalan golongan, etnis, dan agama. Caranya dengan taktik bernegosiasi dan dialog dengan narasi dominan.

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, maka konstruksi identitas kepapuan mendapat ruang yang cukup leluasa sehingga orang Papua sendiri mendapat peluang untuk mengkonstruksikan identitasnya secara terbuka. Proses pembentukan identitas kepapuan pada era reformasi, yaitu identitas yang cair, sesuai dengan teori identitas yang anti esensialistik dari Hall. asumsinya teori ini adalah bahwa identitas sepenuhnya merupakan kebudayaan, yang dibentuk berdasarkan ruang dan waktu. Ini merupakan pandangan kaum anti-esensialisme yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk identitas senantiasa berubah dan berkaitan dengan kondisi sosial dan kebudayaan. Identitas adalah konstruksi-konstruksi yang tidak saling berkaitan, makna-maknanya senantiasa berubah mengikuti ruang dan waktu, serta penggunaannya.

Proses konstruksi identitas kepapuan pada era reformasi juga sesuai dengan konsep identitas yang dikemukakan oleh Antony Giden yang berpendapat bahwa identitas diri adalah apa yang kita pikirkan tentang identitas diri tersebut dalam kapasitas sebagai person. Namun ia juga

berargumen bahwa identitas bukan sekumpulan sifat-sifat yang kita miliki.; bukan sesuatu yang kita miliki. Dengan demikian, identitas adalah mode berpikir tentang diri kita sendiri. Hanya saja apa yang kita pikirkan itu senantiasa berubah dari lingkungan satu ke lingkungan lain menurut ruang dan waktu. Inilah sebabnya, mengapa Giddens mendiskripsikan identitas sebagai suatu proyek. Dengan argumen ini ia mengartikan bahwa identitas adalah suatu yang kita ciptakan, sesuatu yang senantiasa berproses, yang terus maju ke depan daripada tetap.

Berdasarkan teori yang lebih menekankan bahwa identitas bersifat cair, dan juga memanfaatkan momentum era reformasi, maka orang Papua mengkonstruksikan diri secara terbuka. Proses pembentukan identitas pada fase ini sesuai dengan asumsi teoretik bahwa identitas bukan saja bersifat dinamis dan merupakan sebuah proyek sebagaimana dikatakan oleh Hall dan Giddens, tetapi juga sebuah proses kompetisi. Asumsi teoretik ini mengandaikan bahwa identitas sebuah komunitas bisa mengalami krisis, dan bahkan hilang sama sekali. Dalam situasi seperti itu, proses pembentukan identitas dapat dikatakan sebagai sebuah strategi survival. Karena itu agar dapat bertahan dalam suatu medan pertarungan identitas, maka pemerintah Papua (khususnya pemerintah Kabupaten Jayapura menerapkan politik pemberdayaan berbasis multikulturalisme.

Harus diakui bahwa konstruksi identitas masyarakat Papua oleh yang mengklaim sebagai orang Papua asli, baik di tingkat elite maupun akar rumput, masih menggunakan konsep etnisitas dan identitas yang bersifat geneologis. Ini juga berimbas dalam keputusan politik lokal yang menggunakan etnosentrisme dalam bidang kepemimpinan daerah. Dalam hal itu, etnisitas banyak ditentukan oleh karakteristik tubuh.

Warga Papua kebanyakan juga mengkonstruksi identitasnya dalam posisi defensif. Di sini logika daerah dengan Otsus dan sistem pemerintahannya bermula dari permasalahan klaim oleh etnis tertentu. Secara histories Otses telah didefinisikan secara meluas dalam istilah-istilah teritori yang mereka tempati dan sumber-sumber serta populasi yang mereka kuasai. Oleh karena itu daerah Otsus memerlukan batas-batas yang tegas antara negara satu dengan daerah lainnya. Dalam pada itu, kewilayahan harus secara masuk akal menunjukkan identitas spesifik sebagai n kelompok yang jika dilihat sebagai bangsa berbeda dengan yang lain. Di sini kemudian terjadi proses politisasi kelompok identitas atau munculnya masalah etnisitas dan konflik etnik sebagai sebuah upaya mempertahankan diri.

Pandangan semacam itu untuk membangun masyarakat Papua ke depan sangat tidak cocok dengan kondisi masyarakat yang semakin heterogen. Konsepsi etnisitas yang geneologis perlu diganti dengan konsepsi kulturalis sebagaimana yang dikatakan Hall yang lari dari implikasi rasis. Sebagaimana Hall mengatakan bahwa istilah etnisitas mengakui adanya tempat sejarah, bahasa dan kebudayaan dalam konstruksi subyektivitas dan identitas, dan juga fakta bahwa semua wacana ditempatkan , diposisikan, disituasikan, dan semua pengetahuan adalah kontekstual.

Masyarakat Papua dalam mengkonstruksi identitasnya juga perlu bergeser dari konsepsi identitas yang bersifat esensialistik menjadi konstruktivistik. Artinya identitas tidak bersifat menetap tetapi merupakan identitas yang terbuka, dinamis, dan cair. Sebagaimana dikatakan oleh Giddens, yang mendeskripsikan identitas sebagai suatu proyek. Dengan argumen ini ia mengartikan bahwa identitas adalah suatu yang kita ciptakan, sesuatu yang senantiasa berproses, yang terus maju ke depan daripada tetap. Konstruksi identitas seperti itulah yang akan sesuai dengan kondisi masyarakat Papua sekarang dan di masa mendatang, sebuah identitas yang terbuka dan mencair.

Daftar Pustaka

- Abdilah, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesatera.
- Adam Schwarz, 1994, *A nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Boulder: Westview.
- Barker, Chris, 2000, *Cultural Studies, Theory and Practice*, London: Sage Publications Ltd.
- Baso, Ahmad, 2003, *Plesetan Lokalitas, Politik Pribumisasi Islam*, Jakarta: Desantara Pustaka Utama.
- Fenton, Steve, 1999, *Ethnicity: Racism, Class, and Culture*, Lanham. Boulder. New York: Rowman & Littlefield Publishers, INC.
- Foucault, Michel, 1980, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (ed. Colin Gordon). New York: Pantheon Books.
- Hall, S. 1992, *The Question of Cultural Identity*, Cambridge: Polity Press.
- _____, 1996, *New Ethnicities*, dalam D Morley and D.K. Chen (ed.) *Stuart Hall*. London: Routledge.
- Nugroho, Heru, 2008, Otonomi Khusus, Pemekaran Wilayah dan Kelompok Demokrasi: Praktek Politik Etnosentrisme di Wamena Papua, dalam *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya*, Ning Retnaningsih dkk. (ed.), Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).
- Poli, W.I.M., dan Dahlan Abubakar, 2008, *Suara Hati yang Memberdayakan: Gagasan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jayapura*, Makasar: Identitas.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2004, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill.

Rogers, Mary F. (ed), 1996, *Multicultural Experience, Multicultural Theories*, New York: McGraw-Hill.

Van Dijk, T.A., 1993, *Elite Discourse and Racism*. Newbury Park, CA: Sage.

Wahyono, Bayu, S. dkk., 2004, *Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi*, Yogyakarta dan Jakarta: Inpedham dan Depkominfo.

Week, J., 1990, *The Value of Difference*, dalam J. Rutherford (ed.) *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.